

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh:
Afrizal

Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau-Indonesia

Detri Karya

Dosen Fakultas Ekonomi, Program Studi Ilmu Manajemen
Universitas Islam Riau-Indonesia
Correspondence Author: detri.k@eco.uir.ac.id

Abstrak

Dalam sebuah organisasi termasuk pemerintahan daerah, apapun bentuknya dalam melaksanakan kegiatan tentunya memerlukan sarana dan prasarana pendukung, baik berupa dana, barang maupun sumberdaya manusia. Kegiatan atau aktivitas suatu entitas/organisasi pemerintah, yang sehari-harinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) akan selalu dijumpai suatu kegiatan yang aktivitasnya melakukan pengadaan (*procurement*). Evaluasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam lingkup metode dan teknik kontrol. Teknik kontrol tersebut menurut Ndraha dilakukan sebelum, sepanjang dan sesudah suatu kebijakan dilaksanakan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metoda kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya. Hasil penelitian ini yaitu Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat *e-procurement*, pada institusi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pelalawan belum memadai. Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya masyarakat dalam melakukan proses upload/pendaftaran berkas dan mengakses situs <http://lpse.pelalawankab.go.id/> . Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas server dan jaringan yang disediakan. Serta Masih adanya oknum-oknum yang yang tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan, memperkaya diri sendiri dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Evaluasi, Pengadaan Barang dan Dinas Pendidikan

PENDAHULUAN

Dalam sebuah organisasi termasuk pemerintahan daerah, apapun bentuknya dalam melaksanakan kegiatan tentunya memerlukan sarana dan prasarana pendukung, baik berupa dana, barang maupun sumberdaya manusia. Kegiatan atau aktivitas suatu entitas/organisasi pemerintah, yang sehari-harinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) akan selalu dijumpai suatu kegiatan yang aktivitasnya melakukan pengadaan (*procurement*).

Mengingat pentingnya pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk menjaga agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan secara efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel serta kian kerasnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk benar-benar menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih, maka pada tahun 2010 presiden Republik Indonesia mengganti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemudian di adakan perubahan dengan di tetapkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Melalui kebijakan tersebut diharapkan proses pengadaan barang/jasa oleh instansi pemerintah bisa memberikan hasil yang lebih menguntungkan bagi negara dan bisa mengurangi kerugian negara akibat pelaksanaan yang tidak benar. Oleh karena itu, kualitas SDM dari Pejabat/Panitia Pengadan Barang/Jasa tersebut mutlak diperlukan sehingga barang/jasa yang diadakan benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan yang merupakan institusi pengelola pendidikan di wilayah Kabupaten Pelalawan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, tentunya tidak terlepas dari kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas ataupun dalam pelaksanaan program pembangunan dibidang Pendidikan.

Kajian penelitian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan ini dilakukan menurut konsep evaluasi yang disampaikan oleh Nugroho, yang menyatakan bahwa pada prinsipnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan evaluasi kebijakan yaitu:¹

1. Apakah Kebijakan itu sendiri sudah tepat.
2. Tepat Pelaksanaannya
3. Tepat Target
4. Tepat Lingkungan

Keempat persyaratan tersebut, merupakan syarat agar sebuah kebijakan yang ditetapkan dapat dikatakan efektif untuk dilaksanakan. Adapun fenomena-fenomena yang penulis temukan selama pra-survey pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan bekerja sama dengan LPSE Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa:

¹ Nugroho, Riant., 2003., Kebijakan Publik Formulasi, Implementyasi dan evaluasi., PT Elex Media Komputindo., Jakarta hal 160

- a. Proses pendaftaran kegiatan *e-procurement* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan masih dirasakan sulit dan berbelit-belit dan cukup membingungkan oleh sebagian rekanan yang ikut dalam proses pengadaan tersebut.
 - b. Ketersediaan jaringan internet yang kurang memadai yang mengakibatkan sulitnya peserta untuk meng-*upload* dokumen yang akan dikirimkan ke LPSE Kabupaten Pelalawan melalui situs <http://lpse.pelalawankab.go.id> atau pengiriman dokumen melalui *e-mail* masih sering terjadi kegagalan pengiriman.
 - c. Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah belum mampu memecahkan permasalahan yang terjadi khususnya dalam memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem *e-procurement*
2. Masih ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dilaksanakannya. SKPD
 3. Ketepatan target kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan untuk beberapa poit kegiatan, tidak terealisasi dengan baik dan belum mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan”.

KERANGKA TEORI

Syafiie,² mendefenisikan ilmu pemerintahan mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekusi dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut U. Rosenthal dalam Ndraha,³ merumuskan: “Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintrahan umum, baik bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses itu secara internal maupun eksternal. Sedangkan Brass merumuskan Ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari cara bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara internal maupun eksternal, yaitu terhadap warga negara.”

Menurut Ndraha⁴ Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

² Syafiie. 2003, Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi), Bandung, Mandar Maju, Hal:36

³ Ndraga, 2005. Kybernologi (Beberapa Konstruksi Utama), Tanggerang Banten, Sirao Credentia Center, Hal:321

⁴ Ndraha 2003. Op Cit p: 6

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁵

Kebijakan merupakan tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.⁶ Sedangkan menurut Fidrick Pengertian Kebijakan adalah: “suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”⁷

Evaluasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam lingkup metode dan teknik kontrol. Teknik kontrol tersebut menurut Ndaraha dilakukan sebelum, sepanjang dan sesudah suatu kebijakan dilaksanakan.³² Menurut Nugroho, pada prinsipnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan yaitu:⁸

1. Apakah Kebijakan itu sendiri sudah tepat.
2. Tepat pelaksanaannya.
3. Tepat Target.
4. Tepat lingkungan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dimaksud dengan Pengadaan Barang dan jasa adalah sebagai berikut: “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.⁹ Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Efisien; b) Efektif; c) Transparan; d) Terbuka; e) Bersaing; f) Adil/tidak diskriminatif; dan g) Akuntabel.

Sutedi menyatakan bahwa *e-procurement* adalah sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) berbasis internet, yang bertujuan untuk memudahkan *sourcing*, proses pengadaan dan pembayaran; memberikan komunikasi *online* antara *buyers* dengan *vendors*; mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan; menghemat biaya dan mempercepat proses.¹⁰

Dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik melalui sistem pelelangan ataupun Penunjukan Langsung.

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2

⁶ Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Media Presindo, hal 16

⁷ Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara hal:3

³² Ndaraha. T. 2003. Ilmu Pemerintahan I, II, III, IV (Kybernology). Jakarta : Rieneka Cipta

⁸ Nugroho, Riant., 2003., Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan evaluasi., PT Elex Media Komputindo., Jakarta hal 160

⁹ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat 1

¹⁰ Sutedi, Adrian, 2008, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar grafika, Jakarta.

Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan sistem *e-procurement* yaitu sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi dan komunikasi (ICT) berbasis internet, maka kegiatan ini dilakukan dengan cara bekerjasama dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pelalawan. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi, dan dalam Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kabupaten Pelalawan, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metoda kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut wajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya¹¹

Penelitian dilakukan di Kantor LPSE Kabupaten Pelawan dan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena berdasarkan hasil pra-survey di ketahui bahwa pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden dalam Penelitian ini adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum terselenggara dengan baik. Dan untuk itu perlu kiranya dilakukan kajian penelitian lebih mendalam mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga kriteria informan penelitian yaitu informan kunci, informan utama dan informan tambahan yaitu sebagai berikut:

1. Informan Kunci (*Key Informan*) adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, Kepala LPSE Kabupaten Pelalawan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Informan utama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan
3. Informan Tambahan adalah Kontraktor Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang mengikuti kegiatan Pelelangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

PEMBAHASAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, dapat dimengerti apabila banyak kalangan yang berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk

¹¹ Ndraha, Taliziduhu. 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Rineka Cipta. Hal:23

mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka tahap terakhir dari proses kebijakan adalah melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.¹²

Dalam penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, penulis menggunakan prinsip empat tepat menurut Riant Nugroho, pada prinsipnya ada empat tepat yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu :¹³

1. Apakah kebijakan tersebut sudah tepat
2. Tepat pelaksanaannya.
3. Tepat target.
4. Tepat lingkungan.

Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, saat ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Mengenai ketepatan kebijakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

Ketepatan Kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi ketepatan kebijakan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat disimpulkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mampu memecahkan permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan. Dengan ditetapkannya kebijakan tersebut, maka proses pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dapat terselenggara dengan baik, efisiensi, efektif, transparans, terbuka, berdaya saing tinggi adil serta akuntabel sesuai dengan tujuan dari ditetapkannya peraturan tersebut.

Ketepatan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilakukan kepada informan penelitian di ketahui bahwa pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan telah tepat pelaksanaan. Dalam mengadakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, telah dilaksanakan dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah, kelompok masyarakat dan pengusaha. Permasalahan yang terjadi terkait dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan antara lain adalah:

¹² Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta, Bayumedia. Hal:112

¹³ Nugroho, Riant., 2003., Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan evaluasi., PT Elex Media Komputindo., Jakarta, hal: 179

1. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat *e-procurement*, pada institusi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pelalawan belum memadai. Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya masyarakat dalam melakukan proses upload/pendaftaran berkas dan mengakses situs <http://lpse.pelalawankab.go.id/>. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas server dan jaringan yang disediakan.
2. Masih adanya oknum-oknum yang yang tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan, memperkaya diri sendiri dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan.
3. Adanya pengusaha yang melaksanakan kegiatan pengadaan tidak sesuai dengan progres pekerjaan, sehingga hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan perencanaan kegiatan.

Ketepatan Target Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

Dari hasil evaluasi tersebut dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sudah sesuai dengan perencanaan karena karena sudah dilakukan tahapan proses pengadaan yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis pengadaan.
2. Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi di wilayah Kabupaten Pelalawan.
3. Keefektifan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sudah efektif dan efisien. Permasalahan yang terjadi justru pada kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di LPSE Kabupaten Pelalawan. Dimana ketersediaan peralatan berupa server internet yang bertujuan untuk pelaksanaan tata cara pembelian barang/jasa secara elektronik (*e-purchasing*) yang belum sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan.

Ketepatan Lingkungan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan berdasarkan indikator ketepatan lingkungan sudah tepat. Menegenai ketetapan lingkungan kebijakan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Interaksi yang terjadi antara perumus kebijakan dengan lembaga terkait yang ada, juga masyarakat dan kelompok masyarakat sudah terlaksana dengan dengan baik.
2. Masyarakat dan lingkungan sosial lainnya telah memberikan respon positif terkait pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

3. Pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pelalawan telah memberikan dukungan politis, strategi dan teknik baik berupa ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, juga telah ditetapkannya Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menaungi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Instansi, Badan, Dinas khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan pada masing-masing informan penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dapat diketahui sebagai berikut:

Ketepatan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi ketepatan kebijakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan diketahui bahwa kebijakan pengadaan barang/jasa dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sudah tepat kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada masing-masing informan penelitian yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diketahui sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sudah mampu menjadi solusi pemecahan berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
2. Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan ini dimulai dari perancangan kebijakan, pengadaan dan penggunaan barang/jasa pemerintah.
3. Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tersebut diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang, melibatkan pemerintah dan masyarakat serta pihak swasta yang merupakan rekanan pemerintah dan sesuai dengan peraturan dan standarisasi atau persyaratan yang telah ditetapkan.

Ketepatan Pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi ketepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sudah tepat pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan telah dilakukan dengan upaya menjalin kerjasama antara pemerintah, kelompok masyarakat, pengusaha swasta daerah ataupun nasional dan juga dengan UMKM yang ada di Kabupaten Pelalawan. Kerjasama ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan yang masih terjadi dalam upaya pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan adalah pada proses pengadaan barang/jasa secara elektronik yang di kelola oleh LPSE Kabupaten Pelalawan. Ketersediaan server

data dan koneksi jaringan yang belum memadai yang mampu menampung jalur lintas komunikasi elektronik mengakibatkan kesulitan tersendiri bagi penyedia barang/jasa dalam melaksanakan aktifitas administrasi pengadaan barang/jasa pada LPSE Kabupaten Pelalawan.

Disamping itu masih ada sebagian oknum aparaturnya pelaksana kegiatan yang memiliki tingkat pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaan tugas yang kurang baik terhadap peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan kegiatan pengayaan diri sendiri sehingga pada akhirnya merugikan keuangan negara.

Kendala berikutnya adalah: harga barang/ material yang sering berubah-ubah, faktor alam yang terjadi dilokasi pembangunan fisik seperti banjir dan lain sebagainya serta masih ditemukan beberapa jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan progres pekerjaan.

Ketepatan Target

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi ketepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan berdasarkan evaluasi ketepatan target pelaksanaan, sudah tepat target.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa ketepatan target pelaksanaan kebijakan tersebut antara lain karena;

1. Kebijakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sudah sesuai dengan perencanaan karena sudah dilakukan tahapan proses pengadaan yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis pengadaan.
2. Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan tidak bertentangan dengan kebijakan lainnya. Namun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang terjadi di wilayah Kabupaten Pelalawan.
3. Keefektifan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan sudah efektif dan efisien. Permasalahan yang terjadi justru pada kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di LPSE Kabupaten Pelalawan. Dimana ketersediaan peralatan berupa server internet yang bertujuan untuk pelaksanaan tata cara pembelian barang/jasa secara elektronik (*e-purchasing*) yang belum sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan.

Ketepatan Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan pada masing-masing informan mengenai ketepatan lingkungan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan menurut hasil penelitian sudah tepat.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan, sudah terjadi interaksi antara perumus kebijakan dengan lembaga terkait lainnya. Begitu juga dengan respon positif yang diberikan oleh masyarakat dan lingkungan sosial lainnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan. Disamping itu, dukungan politik, strategi dan teknik dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan juga telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dengan mendirikan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Lembaga ini bertugas mengatur proses administrasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara lelang elektronik.

KESIMPULAN

1. Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah telah tepat kebijakan. Ketepatan Kebijakan ini disebabkan oleh karena pelaksanaan pelaksanaan barang jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kebijakan tersebut telah mampu menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu: efisiensi, efektifitas, transparansi, keterterbukaan, berdaya saing, adi dan akuntabel khususnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan sistem *E-Tendering*.
2. Hasil evaluasi penelitian ketepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan telah tepat pelaksanaan. Ketepatan pelaksanaan kebijakan ini disebabkan oleh karena kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan telah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat pihak swasta dan juga kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada diwilayah Kabupaten Pelalawan. Begitu juga dukungan yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Pelalawan dengan membentuk Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam mengakomodir kegiatan *E-Procurement*.
3. Hasil evaluasi penelitian ketepatan target dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan telah tepat target. Ketepatan target ini disebabkan oleh karena kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan, sudah sesuai dengan perencanaan karena karena sudah melalui tahapan proses pengadaan yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis pengadaan. Keefektifan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan berdasarkan hasil penelitian diketahui sudah efektif dan efisien. Permasalahan yang terjadi justru pada kelengkapan sarana dan prasarana yang ada di LPSE Kabupaten Pelalawan. Dimana ketersediaan peralatan berupa server internet yang bertujuan untuk pelaksanaan tata cara pembelian barang/jasa secara elektronik (*e-purchasing*) yang belum memadai sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan.
4. Hasil evaluasi penelitian ketepatan lingkungan kebijakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah tepat lingkungan. Ketepatan lingkungan ini disebabkan oleh karena kegiatan tersebut telah dilakukan dengan adanya kerjasama atau interaksi antara Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan dengan Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Begitu juga dengan respon positif yang diberikan oleh masyarakat penyedia barang/jasa ditandai dengan semakin meningkatnya animo masyarakat dalam mengikuti proses pelelangan barang/jasa yang dilakukan.
5. Faktor yang menjadi kendala dalam upaya pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Pelalawan disebabkan oleh masih adanya aparatur pemerintah yang memiliki tingkat pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaan tugas yang kurang baik terhadap peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah, melakukan kegiatan pengayaan diri sendiri sehingga pada akhirnya merugikan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara
- Doni, D., Yogya, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021). Management of Market Pelita Retribution In Bangko District In Increasing Original Revenue of Rokan Hilir Regency.
- Doni, D., Yogya, M. A., Zainal, M. D. W., Ayu, A., & Purwati, M. L. H. (2021). Effect of Management of Market Levies Management on Trader Satisfaction.
- Ginting, A. H., & Zainal, Z. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Objek Wisata Alam Teluk Jering Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 211-219.
- Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
- Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tentang Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Media Online CNN Indonesia. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 9(2), 167-184.
- Nugroho, Riant., 2003., *Kebijakan Publik Formulasi, Implementyasi dan evaluasi.*, PT Elex Media Komputindo., Jakarta
- Ndaraha. T. 2003. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Ndraga, 2005. *Kybernologi (Beberapa Konstruksi Utama)*, Tangerang, Sirao Credentia Center, Banten
- Rauf, R., Zainal, Z., & Maulidiah, S. (2020). The Community Participation Dalam Menjaga Kawasan Hutan Di Provinsi Riau. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(01), 60-76.
- Rauf, R., Zainal, Z., Prayuda, R., Rahman, K., & Yuza, A. F. (2020). Civil Society's Participatory Models: a Policy of Preventing Land and Forest Fire in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(3), 1030-1046.
- Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 6(2), 27-38.
- Riauan, M. A., Sari, G. G., Aslinda, C., & Qurniawati, E. F. (2018). Konstruksi Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. *Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi*, 171.
- Riauan, M. A. I., & Aziz, A. (2019). Professional Gamer: The Meaning on 'Point Blank Online' Play. *Jurnal The Messenger*, 11(1), 18-26.
- Riauan, M. A. I., Sari, G. G., Aziz, A., Prayuda, R., & Sikumbang, A. T. (2020). Refleksi Anomali Makna Perilaku Merokok di Kalangan Dosen Universitas Islam Riau. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 207-222.

- Riauan, M. A. I., Aziz, A., Fitri, A., Mulyani, O., & Zainal, Z. (2020). Stereotip Budaya Pada Himpunan Mahasiswa Daerah di Pekanbaru. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 5(1), 43-56.
- Satria, A., Yogya, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office in Development of Cultural Heritage at Kuantan Singingi Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 282). European Alliance for Innovation.
- Sukendro, G. G., Pandrianto, N., Oktavianti, R., & Sari, W. P. (Eds.). (2022). Komunikasi Anak Muda untuk Perubahan Sosial. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=EZZaEAAAQBAJ>(Halim et al., n.d.)
- Sugioyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung
- Sutedi, Adrian, 2008, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Sinar grafika, Jakarta.
- Trijupitasari, R., & Riauan, M. A. I. (2017). Pola Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mensosialisasikan Bahaya HIV dan AIDS Kepada Penjaja Sex dan Gay. *MEDIUM*, 6(1), 78-86.
- Syafiie. 2003, Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi), , Mandar Maju, Bandung
- Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bayumedia. Jakarta,
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Presindo, Yogyakarta
- Yogya, T. S. M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, R. P. (2021). Ecological Citizenship Camat and Village Head in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci Sub District Pelalawan Regency.
- Zainal, Z. (2016). Dinamika Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015). *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 19-36.
- Zainal, F. N. P. (2021, December). Government Management in Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income In Kampar District. In *ICLSSE 2021: Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE* (Vol. 9, p. 169).
- Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2).